

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian ialah salah satu bidang akan menjadi prioritas pada pembangunan nasional yang berkelanjutan dinegara agraris (Dumasari, 2020). Sektor pertanian menjadi kunci pembuka bagi keberhasilan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial budaya, kelestarian lingkungan, stabilitas dan keamanan. Ketergantungan masyarakat tinggi terhadap keberadaan pertanian. Ragam kegiatan pertanian ditekuni oleh petani sehingga jadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di pedesaan agraris.

Pembangunan pertanian ialah proses tranformasi yang meliputi multi-aspek tata hidup manusia baik secara individual, kelompok, organisasi selaku warga masyarakat (Dumasari, 2020). Tahapan pembangunan pertanian terkait erat dengan pemanfaatan IPTEK yang tepat sasaran dan tepat guna. Program diberikannya pupuk dengan subsidi sebetulnya sudah diawali tahun 1970-an, tapi saat ini, petani sebagai yang menerima kemanfaatan program tersebut masih sulit dalam mengakses. Hal ini disebabkan karena dalam penyaluran pupuk dengan subsidi tidak tepat sasaran. Selain itu kebanyakan petani berusia lebih dari 50 tahun sehingga sulit menerima teknologi baru dalam penggunaan kartu tani untuk membeli pupuk dengan subsidi. Adanya program kartu tani harapannya pada penyaluran pupuk dengan subsidi tepat sasaran, apabila petani tersebut tidak mempunyai kartu tani maka petani tidak bisa membeli pupuk bersubsidi.

Adanya pupuk dengan tepat baik jumlah, jenis, mutu, harga, tempat, dan waktu dapat ditentukannya kuantitas dan kualitas hasil pertanian yang dihasilkannya. Penyebab akan berpengaruhnya untuk penggunaan pupuk ialah; pupuk bisa dibeli petani, pupuk tersedia di pasar, dan pupuk mudah didapatkan petani (Rusastra dkk, 2002 dalam Widiatmoko, 2017). Pemerintah membuat kebijakan ketersediaan pupuk bagi petani lewat harga pupuk bersubsidi. Tetapi, dalam menjalankannya ada masalah mengenai pengontrolan penyediaan, dan distribusi pupuk dengan subsidi tersebut.

Kebijakan penyaluran pupuk dengan subsidi berdasarkan aturan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 dengan diaturnya mengenai penyediaan dan distribusi pupuk dengan subsidi pada bidang Pertanian, tapi kebijakan tersebut tidak bisa menyediakan pupuk yang seharusnya terjamin bagi petani. Adapun penyediaan pupuk terjadi kekosongan pada berbagai provinsi satu diantaranya di Provinsi Jawa Tengah. Kelangkaan pupuk yang terjadi dapat diatasi, dengan diterapkannya kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berguna untuk membentuk pengontrolan akan dilaksanakan pemerintah dalam mengontrol distribusi pupuk dengan subsidi.

Berdasar Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk dengan subsidi TA 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI tahun 2017, pupuk dengan subsidi ialah barang dalam pengontrolan yang penyediaan dan pendistribusian mendapatkan subsidi dari Pemerintah guna keperluan kelompok tani / petani di bidang pertanian. Berdasar pada petunjuk pelaksanaan Pengadaan

Pupuk dengan subsidi Tahun 2018 mendapatkan lima macam pupuk dengan subsidi yang dikhususkan untuk petani yakni urea, sp 36, za, npk, dan organik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan BRI, mengeluarkan kartu tani sebagai sarana untuk memaksimalkan kebijakan pupuk dengan subsidi untuk warga. Kartu tani menurut Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 521.1/ 014725 mengenai Petunjuk Teknis Kartu Tani Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia di Provinsi Jawa Tengah, ialah kartu debit BRI *co branding* yang dimanfaatkan secara khusus guna membaca distribusi pupuk dengan subsidi dan transaksi pembayaran pupuk dengan subsidi di mesin EDC (*Electronic Data Capture*) BRI sehingga bisa ditempatkan di pengecer serta bisa berguna untuk melaksanakan seluruh transaksi perbankan pada umumnya.

Kartu tani terintegrasi dapat dipergunakan dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI). Sistem tersebut berisikan data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang terdiri atas nama petani, luas lahan, jenis tanaman, dan alokasi pupuk yang dibutuhkan petani. Data yang tersedia lengkap dan akurat pada kartu tani tersebut juga bisa dipergunakan sebagai dasar pembuatan kebijaksanaan dalam peningkatan membangun pertanian.

Program kartu tani untuk warga bertujuan sebagai menyalurkan pupuk dengan subsidi agar sesuai sasaran yang berdasarkan pada enam asas yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat lokasi, tepat waktu, tepat harga. Petani yang mempergunakan kartu tani bisa memperoleh pupuk dengan subsidi sesuai

keperluan pada seluruh agen / kios yang telah dipilih, dimana aktifitas pertanian bisa berlangsung aman tanpa ada gangguan karena tidak adanya pupuk dengan subsidi. Kartu tani dapat berguna untuk tabungan yang bisa dipergunakan oleh petani supaya kebutuhan hidup bisa terpenuhi.

Pelaksanaan pemakaian kartu tani di Kecamatan Bobotsari, pada saat awal umumnya masih banyak permasalahan antara lain dari kartu tani, petani pemilik kartu tani dan kios pupuk lengkap (KPL). Permasalahan tersebut yang mempengaruhi keengganan petani melakukan transaksi pembelian pupuk bersubsidi dengan mempergunakan kartu tani sehingga aplikasi dari kartu tani belum bisa berjalan dengan baik (Data penggunaan kartu tani BPP Bobotsari).

Kebijakan Pemerintah tentang penggunaan kartu tani dimulai pada tahun 2018. Pada bulan September 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mewajibkan jika membeli pupuk dengan subsidi wajib mempergunakan kartu tani. Sehingga jika petani tersebut kartu tani tidak terbawa maka tidak akan dilayani oleh kios pupuk lengkap. Di Kecamatan Bobotsari jumlah petani yang memiliki kartu tani 3043 orang yang terbagi menjadi 16 desa. Usahatani di Kecamatan Bobotsari yaitu padi, jagung dan hortikultura. Dimana dalam proses budidayanya memerlukan pupuk sehingga para petani harus mempunyai kartu tani untuk pembelian pupuk. Dengan permasalahan yang ada, perlu dilaksanakan penelitian tentang analisis efektivitas penggunaan kartu tani di Kecamatan Bobotsari.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi petani pengguna kartu tani di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana keragaan usahatani yang dikelola oleh petani pengguna kartu tani di lokasi penelitian?
3. Bagaimana proses penggunaan kartu tani di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga?
4. Bagaimana efektivitas penggunaan kartu tani di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Karakteristik sosial ekonomi petani pengguna kartu tani di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.
2. Keragaan usahatani yang dikelola oleh petani pengguna kartu tani di lokasi penelitian
3. Proses penggunaan kartu tani di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.
4. Untuk menganalisis efektivitas penggunaan kartu tani di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini harapannya bisa digunakan untuk pengembangan ilmu tentang teori-teori yang dipelajari.
 - b. Penelitian ini harapannya bisa memberi dan menambahkan wawasan serta sebagai bahan perbandingan para peneliti berikutnya.
2. Manfaat Praktisi
 - a. Bagi Peneliti sebagai media belajar cara mengaplikasikan wawasan yang dimiliki dalam membantu dan memahami dalam menganalisis efektivitas program kartu tani yang meliputi keberhasilan program, keberhasilan sasaran dan kepuasan terhadap program . Bagi Mahasiswa lain dapat memberikan masukan tambahan tentang pembendaharaan ilmu pengetahuan terutama mengenai penyerapan teknologi baru oleh petani.
 - b. Bagi Universitas dapat sebagai kajian keilmuan yang dapat dikembangkan penelitiannya.
 - c. Bagi Dinas Terkait sebagai langkah pengambil kebijakan terhadap petani tentang Penggunaan Kartu Tani.

E. Pembatasan Masalah dan Asumsi

1. Keragaan usahatani hanya dibatasi pada jenis usahatani yang dikelola, Jenis Pupuk, Varietas Padi, dan Varietas Jagung.
2. Data yang digunakan adalah data selama Tahun 2021.
3. Penelitian dilaksanakan di tiga desa (Desa Kalapacung, Desa Pakuncen, Desa Karangtalun).

